



PRO-KONTRA 3 PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

Timothy Ivan Triyono, S.H.
Sekretaris Jenderal Jokpro 2024
0812-8652-9841

 **timothyivann**



INTRODUKSI & DISCLAIMER

- Moh. Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa perubahan konstitusi merupakan konsekuensi dari teori konstitusi dimana konstitusi merupakan ‘resultante’ dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- Presiden SBY juga pernah mengusulkan masa jabatan presiden 3 periode.
- Gagasan Jokpro 2024 adalah Jokowi-Prabowo 2024, bukan “Masa Jabatan 3 Periode”. Walau sebagai konsekuensi dari gagasan Jokpro 2024, maka perlu perpanjangan masa presiden.
- Untuk perpanjangan masa presiden, diperlukan amandemen UUD 1945. Untuk amandemen UUD 1945 diperlukan dukungan MPR dan dukungan publik.
- Jokpro 2024 akan berjuang agar MPR dan publik mendukung Jokowi-Prabowo 2024. Caranya dengan sosialisasi gagasan Jokpro 2024 termasuk mengapa perlu dan bagaimana caranya.
- Mari kita lihat peluang gagasan Jokowi-Prabowo 2024 dari perspektif hukum dan politik.

INTRODUKSI & DISCLAIMER

- 8 Fraksi di DPR RI telah menyatakan persetujuan terkait rencana Amandemen Kelima UUD NRI 1945, ialah:

No	Partai	Usul, Materi dan Fokus Perubahan
1	PDI-P	Pentingnya menghidupkan kembali GBHN
2	PG	Amandemen terbatas, kembali ke versi asli dan penguatan DPD
3	PKB	Penguatan kewenangan MPR kaitannya dengan GBHN
4	NASDEM	Mendukung GBHN
5	PPP	Menghidupkan kembali GBHN dan evaluasi MK
6	GERINDRA	Kembali ke UUD asli, menghidupkan GBHN
7	PKS	Menghidupkan GBHN
8	PAN	Menghidupkan GBHN
9	PD	Belum ada tanggapan

Sumber:

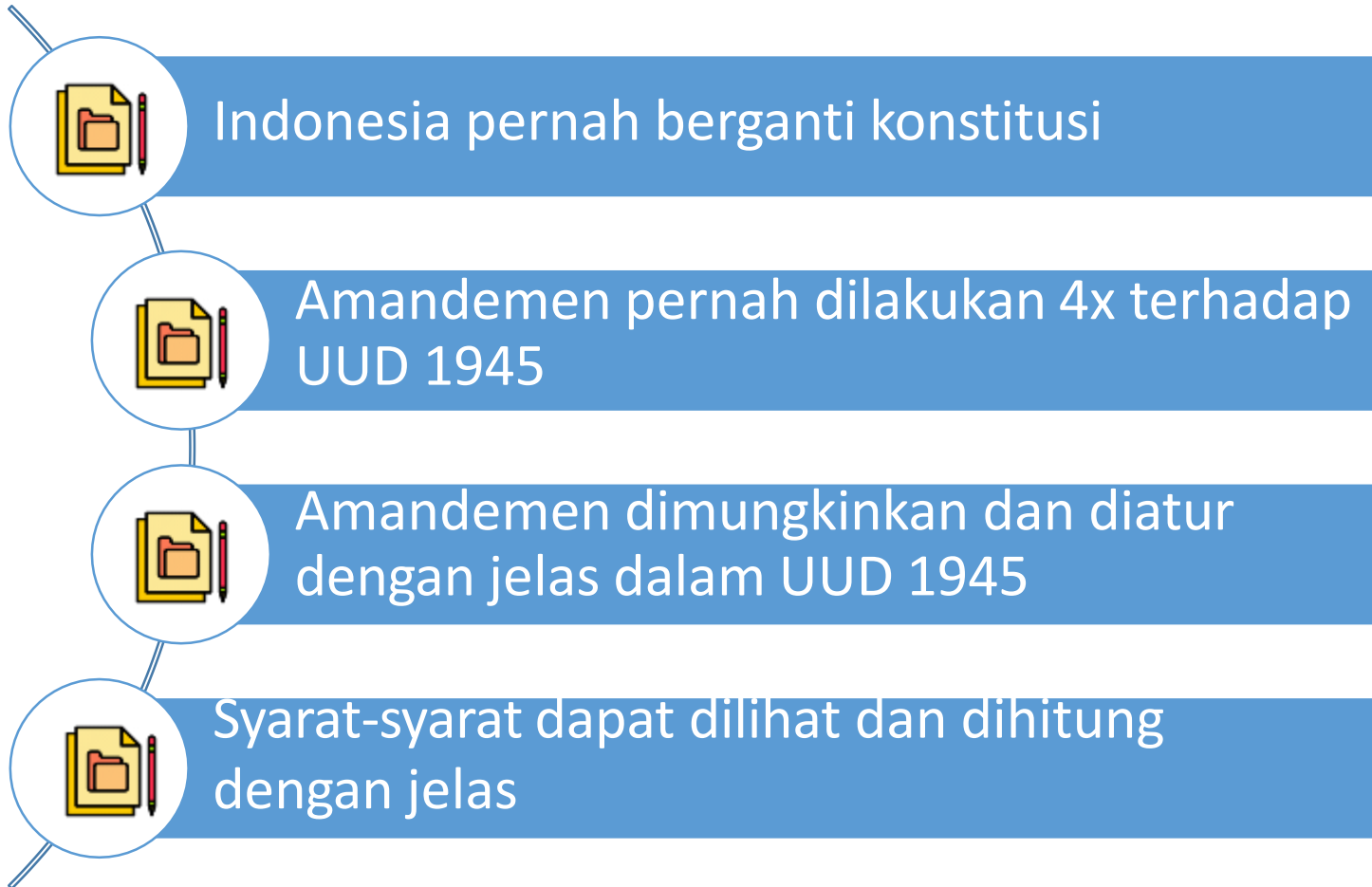
Budiarti Utami Putri, “Peta Sikap Partai-Partai Politik Soal Rencana Amandemen UUD 1945,” *Tempo*, last modified 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1234781/peta-sikap-partai-partai-politik-soal-rencana-amandemen-uud-1945/full&view=ok,.>

I

PERSPEKTIF HUKUM



POIN POKOK



Pengalaman Konstitusi Republik Indonesia [1]



Sumber: <https://tokopresentasi.com/portfolio-items/infografis-sejarah-perkembangan-uud-konstitusi-indonesia/>

Pengalaman Konstitusi Republik Indonesia [2]

1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

- Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

- Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya.
- Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

- Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan.
- Pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

- Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945.

PENGALAMAN AMANDEMEN UUD 1945



Amandemen I
(14-21 Oktober 1999)

- Fokus amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden.

Amandemen II
(7-18 Agustus 2000)

- Fokus amandemen dengan menambahkan aturan antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)

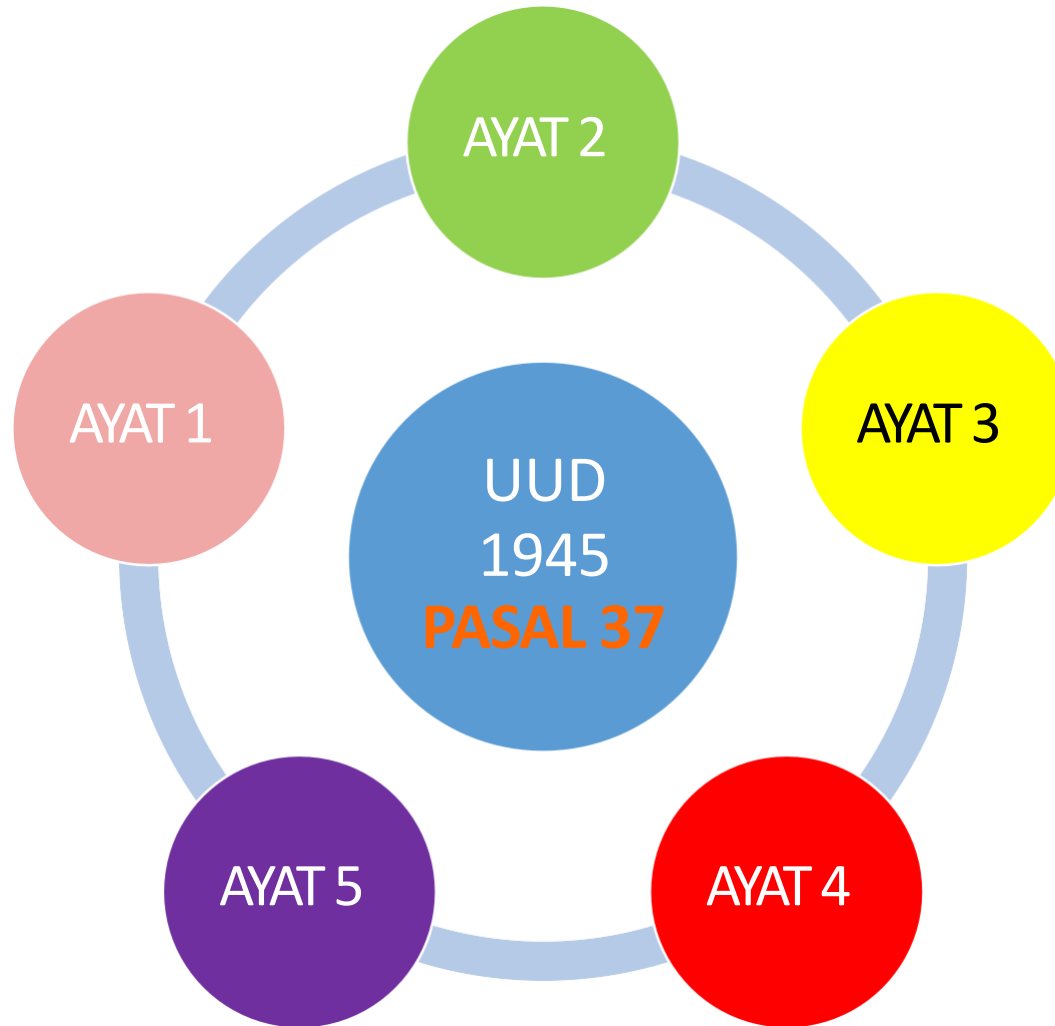
Amandemen III
(1-9 November 2001)

- Sejumlah perubahan besar dilakukan, misalnya terkait bentuk dan kedaulatan Negara, aturan pemakzulan, pembentukan lembaga Negara seperti DPD, KY, dan MK.
- Mengamankan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung. Tidak lagi dilakukan oleh MPR

Amandemen IV
(1-11 Agustus 2002)

- Amandemen keempat lebih kepada masalah pendidikan dan perekonomian Negara. Ada penambahan ayat di Pasal 33.
- Amandemen keempat UUD 1945 juga menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Pasal-pasal UUD 1945 Tentang Amandemen



SYARAT AMANDEMEN UUD 1945



Alasan perubahan harus jelas ②

- Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap usulan terhadap pasal dalam UUD harus disampaikan dengan jelas mana bagian yang hendak diubah beserta dengan alasannya

Usulan diajukan minimal 1/3 anggota MPR ①

- Total anggota MPR RI (DPR+DPD) 2019-2024 adalah 711 anggota
- Pasal 37 ayat (1) minimal 1/3 dari seluruh anggota MPR RI = 237 (33.3%) anggota

③ Sidang harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR

- Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa sidang harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota MPR
- Adapun 2/3 dari anggota MPR = 474 (66.7%) anggota

Keputusan perubahan harus disetujui minimal 50%+1 anggota MPR ④

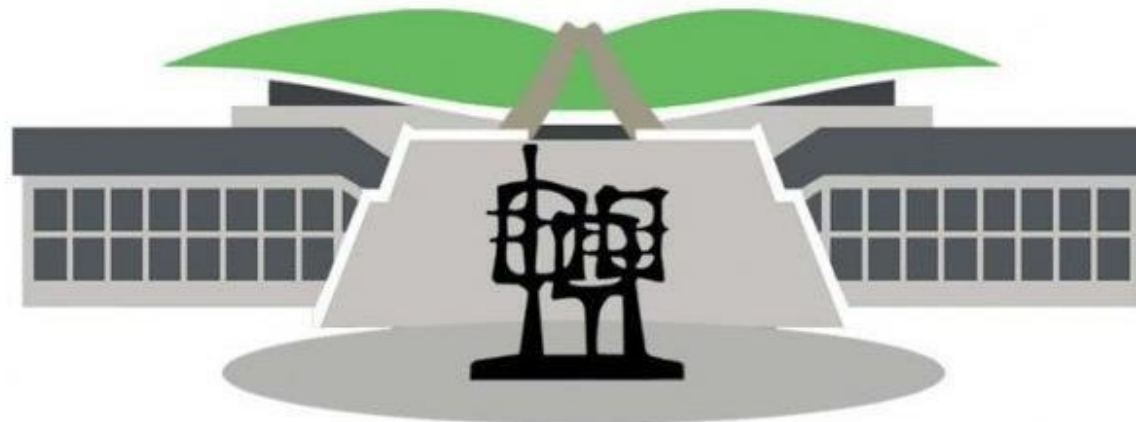
- Pasal 37 ayat (4), keputusan perubahan harus disetujui minimal 50%+1 atau setengah dari jumlah anggota MPR dan ditambah satu orang dari anggota MPR adalah sekitar 357 anggota
- Jika kurang, maka perubahan tidak bisa dilanjutkan

⑤ Pasal mengenai bentuk Negara tidak bisa diubah

- Dalam ayat (5) mengenai perubahan pasal dalam UUD 1945, mengenai bentuk negara kesatuan Indonesia tidak dapat diubah dengan alasan apapun.



MPR RI2019-2024



MPR RI= 711

**DPR RI
(575)**

**DPD RI
(136)**

DPD RI 2019-2024

1. AFILIASI PARTAI POLITIK = 35 (25.7%) ANGGOTA

➤ Contoh Afiliasi Parpol:

Mahyuddin (Golkar), Nono Sampono (Nasdem), Sabam Sirait (PDIP), Teras Narang (PDIP), Sultan Bachtiar Najamudin (PDIP)

2. AFILIASI NON PARTAI POLITIK = 101 (74.3%) ANGGOTA

➤ Contoh Non Afiliasi Parpol:

Jimly Asshiddiqie, Sylviana Murni, Intsiawati Ayus, Fahira Idris, Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Pimpinan DPD RI 2019-2024



Ir. H. AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI
KETUA DPD RI



Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (NASDEM)
WAKIL KETUA



Dr. H. MAHYUDIN, S.T., M.M. (GOLKAR)
WAKIL KETUA



SULTAN B. NAJAMUDIN (PDIP)
WAKIL KETUA

II PERSPEKTIF POLITIK





MENGAPA
JOKOWI-PRABOWO 2024?

Jokowi-Prabowo 2024 adalah sebuah Visi





MENGAPA JOKOWI-PRABOWO 2024?



Menjawab tesis polarisasi ekstrim pada pilpres 2024 yang polanya semakin mengeras dari 2014, 2017 dan 2019. Menghindari tawuran nasional (from voting to violence) dalam pilpres 2024.



Pasangan Jokowi-Prabowo jika dibukakan pintunya oleh amandemen UUD 1945, maka akan menjadi paslon tunggal versus kotak kosong di pilpres 2024. Indonesia akan aman dan damai, sehingga dapat berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan bangsa.



TIGA KONDISI BESAR JELANG 2024

KONDISI PERTAMA:

Kita berada di era politik identitas (Identitas sebagai martabat tertinggi dan menjadi sumber konflik – Francis Fukuyama) yang melahirkan polarisasi ekstrim di mana-mana, termasuk Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki latar belakang masyarakat beragam secara suku, agama, dan pembelahan politik yang potensial melahirkan benturan tsb sehingga harus diantisipasi.

BANGSA INDONESIA BERAGAM SUKU



BANGSA INDONESIA BERAGAM AGAMA





Spektrum Ideologi Partai Politik

SPEKTRUM I	SPEKTRUM II	SPEKTRUM III	SPEKTRUM IV
Non Santri (Islam Abangan)		Santri (Islam Tradisional dan Modernis)	
Nasionalis Proteksionis. Ciri: intervensi Negara terhadap pasar	Nasionalis Kapitalis. Ciri: Pasar bebas.	Islam Tradisional (Nahdlatul Ulama). Ciri: Islam dengan tradisi lokal	Islam Modernis (Muhammadiyah). Ciri: Orientasi atau ideologi pemurnian
PDIP Gerindra	Golkar Demokrat Nasdem	PKB PPP	PAN PKS



Spektrum Ideologi Capres 2014 dan 2019 (secara aktual)

SPEKTRUM I	SPEKTRUM II	SPEKTRUM III	SPEKTRUM IV
Non Santri (Islam Abangan)		Santri (Islam Tradisional dan Modernis)	
Nasionalis Proteksionis. Ciri: intervensi Negara terhadap pasar	Nasionalis Kapitalis. Ciri: Pasar bebas.	Islam Tradisional (Nahdlatul Ulama). Ciri: Islam dengan tradisi lokal	Islam Modernis (Muhammadiyah). Ciri: Orientasi atau ideologi pemurnian
Jokowi Prabowo	- - -	- -	- -



Spektrum Ideologi Capres 2014 dan 2019 (secara strategi elektoral)

SPEKTRUM I	SPEKTRUM II	SPEKTRUM III	SPEKTRUM IV
Non Santri (Islam Abangan)		Santri (Islam Tradisional dan Modernis)	
Nasionalis Proteksionis. Ciri: intervensi Negara terhadap pasar	Nasionalis Kapitalis. Ciri: Pasar bebas.	Islam Tradisional (Nahdlatul Ulama). Ciri: Islam dengan tradisi lokal	Islam Modernis (Muhammadiyah). Ciri: Orientasi atau ideologi pemurnian
Jokowi	- - -	- -	Prabowo

Ijtima Ulama 1 dan 2
(Rizieq Shihab, FPI, GNPF Ulama, dan PA 212)



TIGA KONDISI BESAR JELANG 2024

KONDISI KEDUA:

Potensi benturan tersebut diperkuat oleh situasi saat ini di mana medsos semakin massif dan medsos memiliki sejumlah kelemahan seperti anonimitas yang menghilangkan tanggung jawab, juga algoritma biner yang melahirkan fenomena “echo chamber” yang pada 2019 telah melahirkan fenomena “Cebong” dan “Kampret”.

[HOAKS]

LARANGAN KUMANDANG AZAN JIKA JOKOWI 2 PERIODE



Telah beredar sebuah postingan yang berisi bahwa apabila terjadi dua periode kepemimpinan presiden akan terjadi larangan mengumandangkan azan. Faktanya, hal tersebut **Tidak Benar**. Konten tersebut termasuk dalam kampanye hitam karena sampai saat ini tidak pernah ada larangan untuk mengumandangkan azan. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah telah dijamin oleh UUD 1945. Berulang kali Presiden Jokowi telah membantah **Kabar Bohong** bertendensi **Fitnah Keji** tersebut.

Link:

<https://stophoax.id/blog/post/hoaks-larangan-kumandang-adzan-jika-jokowi-2-periode>

Sumber:

<https://stophoax.id/blog/post/hoaks-larangan-kumandang-adzan-jika-jokowi-2-periode>

AKUN ANONIM PENYEBAR HOAKS



HOAKS RATNA SARUMPAET



"KARTINI MASA KINI"

selamat hari kartini mbak hanum dan ratna....maaf hanya sekedar mengingatkan foto fenomenal ini

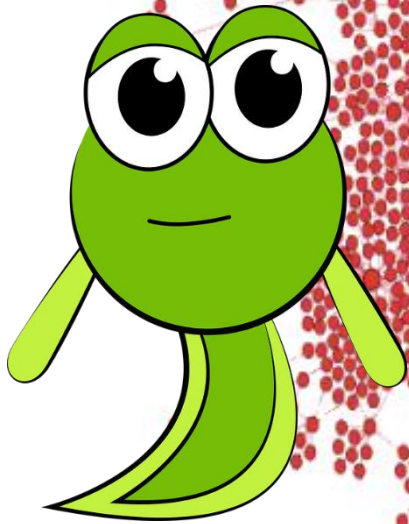
KARTINI MASA KINI



"Saat ini saya bersama Bunda Ratna Sarumpaet, saya bisa merasakan, beliau buat saya adalah Cut Nyak Dien masa kini, KARTINI MASA KINI adalah Bunda Ratna Sarumpaet ."

- Hanum Rais -

FENOMENA ECHO CHAMBER



CEBONG

VS



KAMPRET



TIGA KONDISI BESAR JELANG 2024

KONDISI KETIGA:

Situasi pilpres Indonesia sudah sangat berubah semenjak 2014. Muncul praktik SARA sebagai senjata. Penggunaan isu SARA sangat massif dan elit politik sangat berani main api. Jokowi dituduh Kristen, Komunis, atau Keturunan Singapura lewat Koran Obor Rakyat dan terjadi manipulasi Quick Count yang disiarkan live oleh TV mainstream.

Fenomena hoaks ini berlanjut di pilpres 2019 yang melahirkan pembelahan makin dalam dengan besarnya peran medsos dan WAG di masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada pilpres 2024 jika yang bertarung katakan lah Prabowo vs Anies Baswedan?

Pengalaman Pilpres Indonesia 2014

- Kebohongan disebari melalui koran/tabloid (Obor Rakyat).
- Manipulasi dan penyiaran hasil Quick count (sebelumnya tidak pernah terjadi).
- Jokowi difitnah sebagai kristen, komunis, dan keturunan singapura.
- Prabowo menolak mengakui kekalahan
- Hampir terjadi bentrokan massa Jokowi dan Prabowo di acara pelantikan oleh MPR.

Tabloid Obor Rakyat



Hasil QC berbeda

suara.com

NEWS BISNIS BOLA SPORT LIFESTYLE ENTERTAINMENT OTOMOTIF TEKNO HEALTH

Cek Fakta Infografis Your say JAKARTA BOGOR BEKASI JABAR JOGJA JATENG MALANG JA

NEWS / Nasional / Metropolitan / Internasional

"Quick Count" Berbeda, Tujuh Lembaga Survei Dipanggil Persepi

Ardi Mandiri Rabu, 09 Juli 2014 | 20:44 WIB



Petugas memasang segel pada gembok kotak suara yang berisi logistik Pilpres. [Antara/Fikri Yusuf]

Suara.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (**Persepi**) akan memanggil seluruh lembaga survei yang berada di bawah naungannya untuk mempertanggungjawabkan hasil **quick count** pada **Pilpres 2014**.

TEI

OL

Prabowo Menolak Hasil Pilpres



VOA

BERANDAASVIDEOINDONESIA DUNIA100 HARI PERTAMA BIDENINDONESIA DI AMERIKA

PROGRAM RADIOPROGRAM TV

INDONESIA
22/07/2014
Andyala Waluyo

Prabowo Subianto Tarik Diri dan Tolak Hasil Pilpres 2014

Teruskan
f t e
w g p
Lihat komentar
Print



Kandidat presiden Prabowo Subianto berbicara dengan para pendukungnya di depan kepala-kepala partai koalisinya dalam penandatanganan koalisi permanen di Jakarta (14/7). (Reuters/BeaWiharta)

Pasangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa memutuskan menarik diri dari proses pilpres 2014.

JAKARTA — Dua jam menjelang pengumuman resmi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pemilihan umum dan menarik diri dari proses pemilihan presiden.

Kepada wartawan di markas tim pemenangan Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7), Prabowo Subianto menilai pelaksanaan pilpres telah cacat hukum.

"Maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengembalian suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan pilpres yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri

Terkait



Presiden Minta Capres yang Kalah Ikhlas



Prabowo Katakan Tak Akan Terima Hasil Pilpres



Masyarakat Indonesia Harus Tetap Bersatu dan Damai

Pengalaman Pilgub DKI Jakarta 2017

- 
- Mobilisasi massa Islam di Monas aksi 411 (4 Nov 2016)
 - Mobilisasi massa Islam di Monas aksi 212 (2 Desember 2016).
 - Coretan di masjid yang bernuansa SARA
 - Ada warga meninggal dilarang disholatkan karena mendukung Ahok.

Aksi 411 di Monas



Aksi 212 di Monas



Coretan di Masjid Bernuansa SARA



BERANDA > BERITA

Coretan di masjid, bentuk provokasi jelang Pilkada DKI

5

SEBARAN



Muammar Fikrie

17:35 WIB - Selasa, 11 Oktober 2016



Sejumlah masa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara menggelar aksi demi mengajak warga agar tidak menggunakan isu SARA, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/9). | Reno Esnir /Antara Foto

VIDEO



Jatuh bangun SoftBank

Isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) jadi ancaman serius menjelang Pilkada DKI 2017. Kasus teranyar adalah penemuan coretan berupa gambar salib di sejumlah

Warga meninggal dilarang disholatkan karena pilih Ahok

LIPUTAN 6CAI

HOME **NEWS** RAMADAN BISNIS SAHAM SHOWBIZ BOLA FOTO TEKNO CEK FAKTA V

NEWS Politik **Peristiwa** Megapolitan Rajut Liputan Khusus Infografis Zone MPR RI

Home > News > **Peristiwa**

Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok

Muslim AR
10 Mar 2017, 22:26 WIB

[f](#) [t](#) [g+](#) [e](#) [Share](#)
57.1k



Nenek Hindun

Liputan6.com, Jakarta - Jenazah nenek 78 tahun ditelantarkan oleh masyarakat sekitar. Pasalnya, sang nenek yang sudah tak bisa berjalan sejak lama itu memilih Basuki Tjahaja Purnama alias **Ahok** dan Djarot Saiful Hidayat saat Pilkada DKI putaran pertama.

Pengalaman Indonesia Pilpres 2019

- Hoak Jokowi kristen, komunis masih beredar. Kali ini lewat medsos dan aplikasi pesan seperti WA Group.
- Suami dan istri bercerai akibat perbedaan dukungan calon. Keluarga dan alumni bertikai akibat perbedaan calon.
- Terbelahnya bangsa Indonesia dalam kategori “Cebong dan Kampret”.
- Prabowo 2 kali menyatakan diri sebagai pemenang.
- Bentrokan di Bawaslu antara aparat keamanan dan pendukung Prabowo.
- Jokowi dan Prabowo baru ketemu kembali setelah 3 bulan pilpres.

Suami dan istri bercerai beda pilihan capres

PHOTO



Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna Masa Sidang IV DPR



KPK Tahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya



Diskusi Empat Pilar: Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji



9 Pemkab dan Kota se-Jawa Barat

Makmuri, Relawan Kubu 01: Gara-gara Pilpres Saya Bercerai dengan Istri, Hancur Keluarga Saya

Vitrianda Hilba Siregar

Kamis, 24 Oktober 2019 - 21:38 WIB



Makmuri memperlihatkan surat laporan kehilangan sepeda dan selebar sertifikat apresiasi dari TKN. (Foto/SINDOnews/Vitrianda)

JAKARTA - Hajat besar Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 yakni



Bentrokan di Bawaslu 2019

PEMILU 2019

Bentrokan Hasil Pemilu Sebabkan Enam Orang Meninggal Dunia

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut enam orang meninggal dunia dalam bentrokan antara demonstran dan kepolisian. Sementara itu sebagian massa pendukung Prabowo Subianto merencanakan pengepungan gedung DPR RI.



Kami gunakan cookies untuk memperbaiki penawaran kami bagi Anda. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca dalam penjelasan perlindungan data kami.

Prabowo nyatakan kemenangan

Dua Kali Prabowo Pidato Klaim Menang Pilpres 2019 Tanpa Didampingi Sandiaga

Rabu, 17 April 2019 21:09

Reporter : **Dedi Rahmadi**

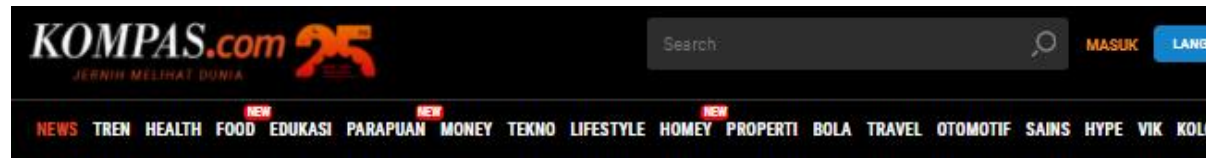


Prabowo Klaim Menang exit poll. @Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Capres **Prabowo Subianto** sudah dua kali menggelar pidato dengan menyatakan diri unggul dari **Jokowi-Ma'ruf Amin** dalam **Pilpres 2019**. Namun ada yang tak biasa, Cawapres **Sandiaga Uno** tak mendampingi Prabowo.

Dalam pidato pertama, Prabowo mengklaim unggul berdasarkan hasil exit poll dan **quick count** yang dilakukan internal. Dia menolak hasil **Quick Count** Pilpres 2019 sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan lawannya, pasangan nomor urut 01.

Pertemuan Jokowi-Prabowo setelah 3 bulan pilpres



[Home](#) / [News](#) / [Nasional](#)

Pertemuan Jokowi-Prabowo, Bertemu di MRT, Pesan Akhiri "Cebong-Kampret" dan Makan Bareng

Kompas.com - 14/07/2019, 09:00 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#) 





APAKAH
JOKOWI-PRABOWO DAPAT
TERWUJUD DI 2024?

Realitas DPR September 2021

detiknews

Home Berita Daerah Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontra

Adsmart Terpopuler Hoax or Not Suara Pembaca

detikNews > Berita

Jokowi dan 7 Ketum Parpol Bahas Evaluasi Otonomi Daerah-Ibu Kota Baru

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews

Rabu, 25 Agu 2021 20:04 WIB

13 komentar

SHARE



Peremuan Jokowi dan parpol koalisi (Foto: dok. Indomedia)

Jakarta - Presiden Jokowi bertemu dengan 7 pasang ketum-sekjen parpol pendukungnya. Ada lima topik pembicaraan dalam pertemuan itu.

Isi pertemuan dijabarkan oleh Sekjen NasDem Johnny G Plate. Dia mengatakan pertemuan digelar dalam suasana yang santai namun fokus. Di ujung pertemuan, ada acara makan malam bersama.

Ketum-sekjen parpol yang hadir adalah:

- Megawati Soekarnoputri dan Haslo Krisdiyanto (PDIP)
- Surya Paloh dan Johnny G Plate (NasDem)
- Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Gerindra)
- Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar)
- Muhaimin Iskandar dan Hasanuddin Wahid (PKB)
- Suharto Monorfa dan Anwani Thomafi (PPP)
- Zukliffi Hasan dan Eddy Soeparno (PAN)

Pertemuan Parpol Non Parlemen di Istana

SINDONEWS.com

#BukanBeritaBiasa

Home

Politik

Hukum

Hankam

Humaniora

Indeks

home > politik

PHOTO



Dihajar Bayern
Munchen 3-0,
Barcelona Tumbang di
Camp Nou



Potret Kekalahan
Cristiano Ronaldo dkk
Saat Keok di Kandang
Young Boys



Sudah Bolah Buka,
Begini Potret dan
Kondisi Sejumlah
Bioskop Hari Ini



Begini Ketangguhan
Tim Gerak Cepat

Jokowi Kumpulkan 5 Parpol Koalisi Non Parlemen, Ini yang Dibahas

Fahreza Rizky, Felldy Utama

Rabu, 01 September 2021 - 20:04 WIB



Presiden Jokowi dikabarkan bertemu dengan lima partai koalisi nonparlemen di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/9/2021). FOTO: GOK/SINDOnews

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bertemu dengan lima partai pendukung pemerintah nonparlemen di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).Kelimanya yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pernyataan Partai Terhadap Wacana Amandemen [1]

No	Pernyataan			
	Parpol	Ketum	Non Ketum I	Non Ketum I
1	PDI Perjuangan	-	Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana (Ketua DPR RI, Puan Maharani. 30 Agustus 2021)	Ahmad Basarah menyebut amandemen Undang Undang Dasar tahun 1945 saat ini bukan hal yang tepat (Waka MPR RI, Ahmad Basarah. 5 September 2021)
2	Gerindra	Gerindra sudah jelas, perjuangan kami kembali ke UUU '45 yang asli (Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. 17 Agustus 2019)	Partai Gerindra mendukung memasukan PPHN dalam amandemen terbatas UUD 1945. (Waka. MPR RI Ahmad Muzani, 23 Agustus 2021)	Untuk melaksanakan amandemen itu harus ada kesepakatan melalui mekanisme di MPR yang harus disetujui anggota DPR dan DPD. (Waka DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. 3 September 2021)
3	Golkar	-	Diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) (Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, 16 Agustus 2021)	Soal amandemen ini belum mendesak. Sikap Partai Golkar sudah jelas bagian sikap partai yang tertuang dalam rekomendasi MPR sebelumnya. Salah satu sebabnya karena masih situasi pandemi. (Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena, 23 Agustus 2021)

Pernyataan Partai Terhadap Wacana Amendemen [2]

No	Pernyataan			
	Parpol	Ketum	Non Ketum I	Non Ketum I
4	PKS	Rencana amendemen UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora atau membuka kesempatan untuk mengamandemen aturan selain Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) (Presiden PKS, Ahmad Syaikh. 1 September 2021)	Sikap PKS ini warisan PKS dulu, saat kondisi Indonesia belum terkena covid dan sangat memungkinkan untuk dilakukan amendemen, saat itu saja kami menolak. Apalagi sekarang saat tidak kondusif (Waka MPR RI Hidayat Nur Wahid, 14 September 2021)	Jika saat ini membahas amendemen UUD 1945 seolah tidak peka dengan situasi ini, apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden. (SekJend PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy, 23 Agustus 2021)
5	PKB	Kalau amendemen tidak mengganggu ruang gerak program aksi dan improvisasi pemerintah atau presiden, ya enggak masalah," (Ketum PKB Muhaimin Iskandar, 22 Agustus 2019)	Sekarang kita ikuti perkembangan nanti, arahan ketua umum, diskusi partai, begitu, tetapi ingin bahwa kalau memang amendemen itu terbatas tapi jangan membatasi yang lain. (Waka MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid, 23 Agustus 2021)	-
6	Nasdem	Bagi Nasdem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas, tanya dulu sama masyarakat kalau mau amendemen (Ketum Nasdem, Surya Paloh. 23 Agustus 2021)	Perlu pertimbangan dari segala aspek dan tata kelola aturan bernegara sebelum memutuskan untuk melakukan amendemen UUD 1945 (Waka MPR RI Lestari Moerdijat, 1 September 2021)	Amendemen harus ada pelibatan dalam bentuk publik. Padahal selama pandemi pelibatan dalam bentuk publik itu tidak mungkin dilakukan (Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari, 19 Agustus 2021)
7	Demokrat	Salah satu yang paling fundamental dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden. Jangan sampai, ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan sejarah demi kekuasaan (Ketum Demokrat, AHY, 8 Juni 2021)	Menurut kami untuk melakukan GBHN atau sekarang PPHN itu cukup melalui Undang-Undang, maksimal bisa melalui TAP MPR. Jadi tidak perlu dengan melakukan perubahan amendemen (Waka MPR RI Syarif Hasan, 6 September 2021)	Partai Demokrat juga menolak rencana amendemen. Alasannya karena khawatir akan merembet kemana-mana. (Waketum Partai Demokrat/Anggot DPR RI Benny K Harman, 23 Agustus 2021)

Pernyataan Partai Terhadap Wacana Amendemen [3]

No	Pernyataan			
	Parpol	Ketum	Non Ketum I	Non Ketum I
8	PAN	Zulkifli Hasan, menilai amendemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sulit terjadi. Wacana amendemen UUD 1945 sebelumnya sudah pernah muncul saat dirinya menjabat sebagai Ketua MPR (Ketum PAN Zulkifli Hasan, 31 Agustus 2021)	Yandri Susanto, meminta wacana amendemen UUD 1945 perlu dikaji lebih mendalam, sebelum diputuskan apakah akan dibahas dalam waktu dekat atau tidak. (Wakuetum PAN/Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, 24 Agustus 2021)	
9	PPP	-	PPP menyatakan terbuka untuk melakukan amendemen UUD 1945. Jadi saya kira nanti kekuatan politik yang terpresentasikan Fraksi-Fraksi di MPR itu sepakat mengusulkan amendemen untuk PPHN tadi maka tetap partisipasi publik harus dibuka. (Waka MPR RI Arsul Sani, 23 Agustus 2021)	-

Penolakan Amandemen UUD1945

- Partai politik: PKS dan Demokrat
- Ormas: PA 212
- Dosen/Peneliti: Formappi, Perludem, dll.

Pro–Kontra Wacana Amandemen UUD 1945 [1]



Pro

No	Narasumber	Pernyataan	Sumber
1	Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bersama dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Ketua PPAD Letjen (Purn) TNI Kiki Syahnakri	Berharap UUD 1945 dikembalikan seperti aslinya, tetapi tetap ada adendum penyempurnaan menyesuaikan zaman. Kami terus lakukan sosialisasi perubahan amandemen UUD 1945. Kami datang ke berbagai daerah salah satunya DIY. Kami terus deklarasi dan nantinya akan diserahkan hasilnya ke MPR.	https://tirto.id/try-sutrisno-purnawirawan-tni-ingin-presiden-dipilih-mpr-lagi-ekBh
2	Penasihat Jokpro2024, M. Qodari	"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 4 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa,"	https://nasional.tempo.co/read/1474383/dukung-jokowi-prabowo-di-pilpres-2024-qodari-dorong-amandemen-konstitusi/full&view=ok https://www.suara.com/news/2021/08/12/101446/serukan-jokowi-3-periode-seknas-jokpro-peluang-amandemen-ada-omnibus-law-saja-disetujui?page=al

Pro–Kontra Wacana Amandemen UUD 1945 [2]

Kontra



No	Narasumber	Pernyataan	Sumber
1	Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti	Jadi saya melihatnya, ini kemauan MPR saja, untuk mengambil kembali powernya atau kekuatan politiknya yang dulu sudah dikembalikan ke rakyat pada Amandemen 1999-2002 yang sebenarnya tidak perlu juga	https://www.merdeka.com/politik/pphn-masuk-amandemen-uud-1945-dinilai-upaya-mpr-mengembalikan-kekuatan-politik.html
2	Pengamat Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari	Jika disimak karena kondisi saat ini sedang pandemi tidak ada relevansi. Atau tidak ada hal yang mendesak atau urgensi untuk melakukan penambahan kewenangan MPR terutama di isu kewenangan membentuk PPHN atau GBHN dengan nama baru	https://www.medcom.id/nasional/politik/wkB4BBIN-pengamat-amendemen-terbatas-uud-1945-tidak-ada-urgensinya
3	Peneliti Formappi, Lucius Karus	Lucius Karus menilai amandemen UUD tidak penting di saat seperti ini. Sebab, Lucius menilai tidak ada konsep terbatas dalam amendemen UUD 1945	https://www.gatra.com/detail/news/520437/hukum/formappi-sebut-bamsoet-aneh-soal-amandemen-uud-1945
4	Pakar Hukum Tata Negara UGM, Antonius Tabusassa Tonralipu	Setiap negara yang terlalu sering mengubah konstitusinya akan mengakibatkan negara tersebut tidak akan pernah stabil. amandemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan. Pasalnya, wacana tersebut kurang mendesak untuk dilakukan. Tak hanya itu, perubahan konstitusi ditakutkan bakal berimbas pada ketidak stabilan kondisi hukum dan politik di dalam negeri.	https://kabar24.bisnis.com/read/20210830/15/1435684/pakar-hukum-ugm-amandemen-uud-1945-tidak-mendesak-dilakukan
5	Ketua PA 212 Slamet Ma'arif	Persaudaraan Alumni 212 berencana mengepung gedung DPR/MPR apabila amendemen UUD 1945 dilakukan. keras karena saat ini tidak ada urgensi amendemen UUD 1945 dilakukan.	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901174419-32-688487/pa-212-ancam-kepung-mpr-jika-amendemen-uud-1945-dilakukan
6	Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini	"Saat keran amandemen dibuka, maka di saat yang sama celah melebar pada wacana di luar PPHN,"	https://www.liputan6.com/news/read/4636434/perludem-pembahasan-pphn-di-amandemen-uud-buka-celah-presiden-kembali-di-pilih-mpr

Pro–Kontra Wacana Amandemen UUD 1945 [3]



Netral

No	Narasumber	Pernyataan	Sumber
1	Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj	Sebagai Ormas, PBNU menyerahkan urusan amandemen kepada partai-partai politik. PBNU sebatas memberikan pandangan dan masukan	https://news.detik.com/berita/d-5711852/soal-jabatan-presiden-3-periode-ketum-pbnu-terserah-parpol
2	Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir	"Jangan sampai di balik gagasan amendemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa,"	https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/11201221/muhammadiyah-ingatkan-jangan-ada-kepentingan-pragmatis-di-balik-wacana?page=all



APAKAH MUNGKIN TERWUJUD?

Sangat Mungkin! Berikut 4 alasan:

Pertama, amandemen UUD 1945 terbuka untuk dilaksanakan. Kedua, mayoritas masyarakat Indonesia puas terhadap Jokowi terlihat dari hasil survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Ketiga, mayoritas elit mendukung Jokowi terlihat dari komposisi dukungan partai politik. Keempat, DPD RI juga cenderung setuju amandemen dan Ketua DPD adalah pendukung Prabowo pada 2014 dan Jokowi pada 2019.

1. Amandemen UUD 1945 Sangat Mungkin



Indonesia pernah berganti konstitusi



Amandemen pernah dilakukan 4x terhadap UUD 1945

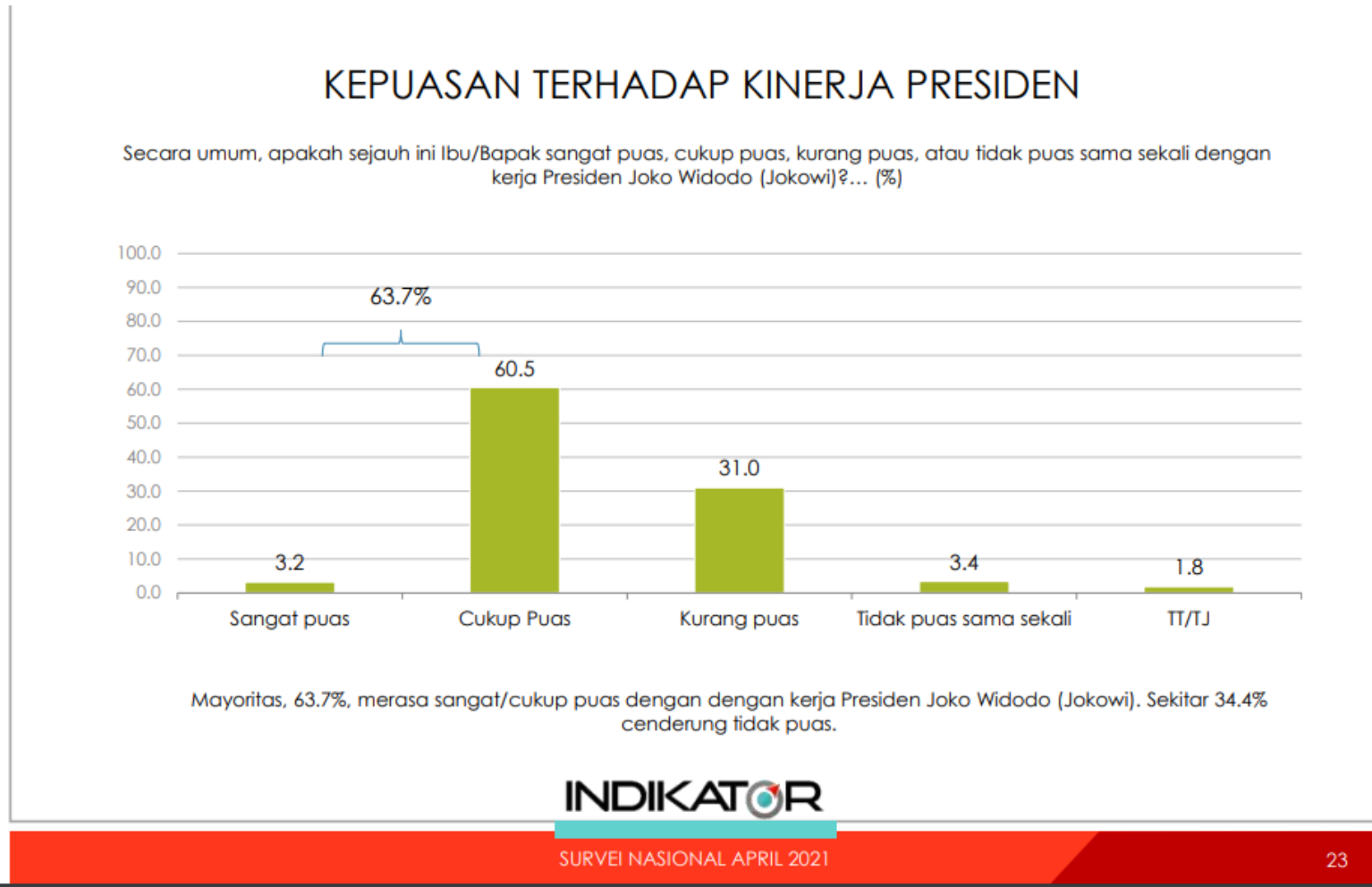


Amandemen dimungkinkan dan diatur dengan jelas dalam UUD 1945



Syarat-syarat dapat dilihat dan dihitung dengan jelas

2. Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi [1]

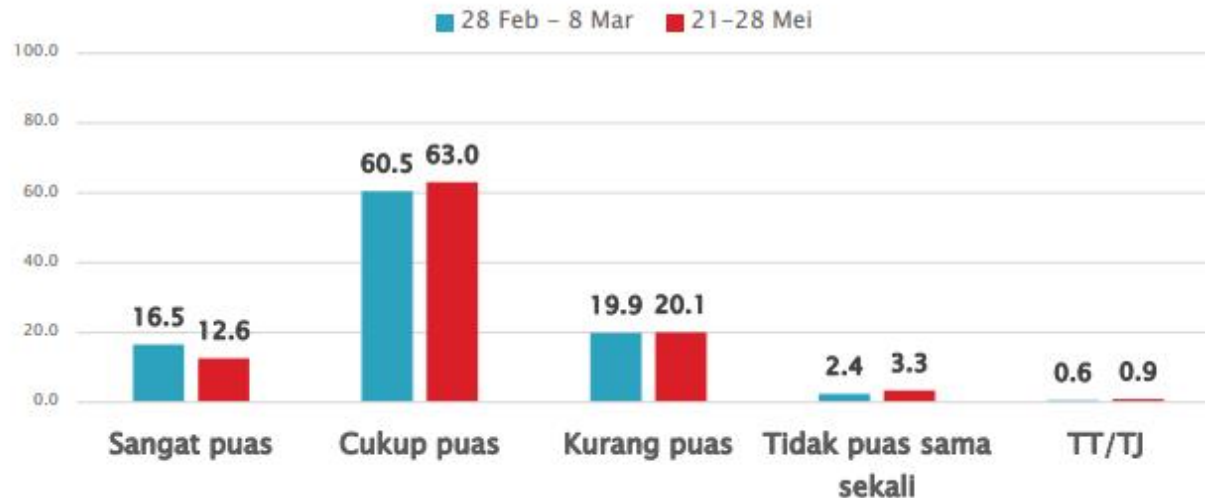


Sumber :
Survei Indikator, 13-17 April 2021

2. Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi [2]

Kepuasan atas Kinerja Presiden Jokowi Secara Umum

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? ... (%)



Mayoritas warga, 75.6%, sangat/cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang/tidak puas 23.4%. Penilaian ini tidak berbeda signifikan dibanding 2-3 bulan lalu.

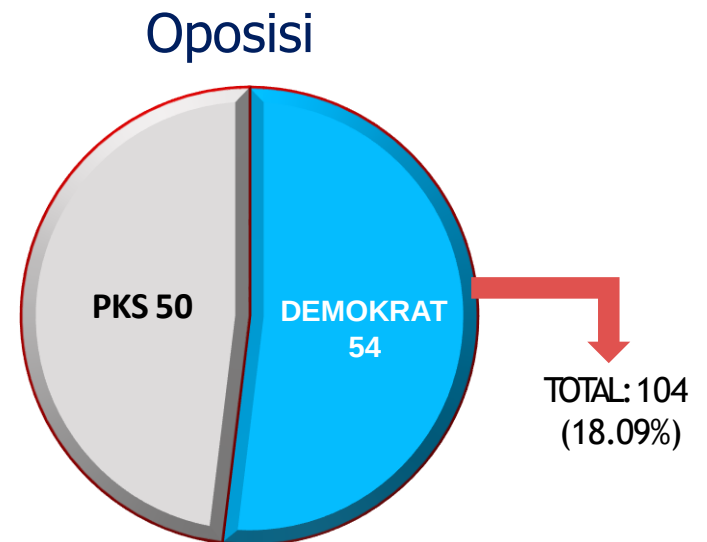
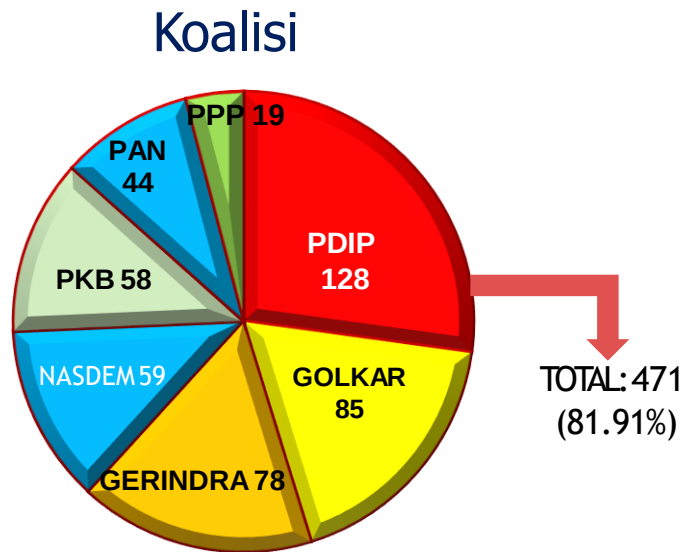
SAIFULMUJANI
research & consulting

Survei Nasional Mei 2021 53

Sumber :

Survei SMRC, 21-28 Mei 2021

3. Mayoritas Elite Dukung Jokowi



4. DPD Ingin Amandemen UUD 1945 dan La Nyalla Pendukung Prabowo dan Jokowi [1]

NASIONAL POLITIK DAERAH ENTERTAINMENT TEKNOLOGI OLAHRAGA OTOMOTIF VIDEO FOTO INDEX

JPNN.com > Nasional > Politik > Ketua DPD RI Dukung Rencana Amendemen UUD 1945, Begini Harapannya

Ketua DPD RI Dukung Rencana Amendemen UUD 1945, Begini Harapannya

Senin, 24 Mei 2021 - 20:00 WIB Suka 1,5 jt





Ketua DPD RI saat menghadiri FGD di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Senin (24/5/2021). Foto: humas DPD RI

jpnn.com, **BANJARMASIN** - Ketua **DPD RI** AA LaNyalla Mahmud Mattalitti setuju dengan wacana amendemen kelima UUD NRI 1945 demi perbaikan dan koreksi atas empat kali perubahan terdahulu.

TERPOPULER

PERIODE: **6 JAM** 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU



Sedang Isoman, Mbak LM Malah Berbuat Terlarang, Bikin Malu Institusi Negara!

1



Detik-Detik DS Membunuh Perempuan yang Menolak Lamarannya, Mungkin Bikin Anda Merinding

2



Roy Kiyoshi Minta Maaf Kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora

3



Dengan Jimat Itu Hambali Mematahkan Kunci Setang dan Tidak Sakit Saat Dipukul

4



Hasil Survei: 91,9 Persen Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Tak Terdeteksi

5

JPNN.com Jatim



4. DPD Inginkan Amandemen UUD 1945 dan La Nyalla Pendukung Prabowo dan Jokowi [2]

HOME > PEMILU >

La Nyalla Academia Dukung Prabowo-Hatta

Oleh : [Tempo.co](#)

Jumat, 6 Juni 2014 21:18 WIB

0 KOMENTAR



Calon Presiden Prabowo Subianto, menggendong Balita saat mengunjungi kawasan permukiman padat Astananyar, Bandung, Jawa Barat (5/6). Prabowo memulai kampanye portama dengan mendatangi sejumlah kawasan publik dan permukiman. TEMPO/Prima Mula

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto, Jumat malam, 6 Juni 2014, menyempatkan diri berkunjung di Rumah Merah Putih yang didirikan oleh La Nyalla Mattalitti di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Surabaya. "Ini merupakan komunitas La Nyalla Academia," kata Nyalla, pendiri La Nyalla Academia, saat menerangkan kepada Prabowo di Rumah Merah Putih, Surabaya, Jumat, 6 Juni 2014.

Komunitas La Nyalla Academia terdiri dari anggota Kadin se-Jawa Timur, anggota Pemuda Pancasila (PP) se-Jawa Timur, anggota Gapeknas, dan anggota Himpunan Pengusaha se-Jawa Timur. "Diperintah atau tidak ini semua bergerak mendukung Pak Prabowo menjadi presiden RI yang ke tujuh," katanya.

Sementara itu, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya dan atas dibentuknya La Nyalla Academia. "Pak La Nyalla sendiri yang saya hormati serta para komunitas La Nyalla Academia," kata Prabowo.

Prabowo datang dari pertemuan dengan para kiai di Kabupaten Pasuruan di Rumah Merah Putih sekitar pukul 18.30 WIB. Prabowo hadir bersama-sama dengan ketua tim kampanye nasional,

TERPOPULER

FOKUS



Pembunuhan Presiden Haiti: Pelaku, Motif dan



Vaksin Covid-19: Dulu Dijanjikan Gratis, Sekarang



Kelangkaan Obat hingga Bed di Tengah Sengkabut



Penyekatan dan STRP, Senjata Jakarta Batasi

TERKINI



Sengketa Pileg, Saksi PKB Sebut Puluhan TPS di Palu Bermasalah

31 Juli 2019



Elite Gerindra: Istri Sandiaga Uno Layak Calon Wali Kota Tangsel

31 Juli 2019



Pengamat Yakin Prabowo akan Oposisi, Ini Sebabnya

30 Juli 2019



Chica Koeswoyo dan Kirana Larasati Perkuat DPD PDIP DKI Jakarta

29 Juli 2019



Seperti Airlangga, Bamsot Mengklaim Didukung 460 DPD

29 Juli 2019



Soal Rekonsiliasi, PKB

4. DPD Ingin Amandemen UUD 1945 dan La Nyalla Pendukung Prabowo dan Jokowi [3]

NEWS ▾ NASIONAL METROPOLIS POLITIK JUSTICE ▾ EKDIS ▾ LIFESTYLE ▾ INDEKS BERITA ▾

NASIONAL POLITIK

Totalitas Dukong Jokowi di Pilpres 2019, La Nyalla Turunkan Ribuan Massa di Deklarasi FAJT

Penulis RANDI ANGGARA | KABARKOTA.CO.ID - 3 Februari 2019





SURABAYA – Ribuan massa dari La Nyalla Academia yang hadir dalam acara deklarasi dan penyematan tim blusukan Jatim #01, yang diselenggarakan oleh Forum Alumni Jatim (FAJT) di Jalan Pahlawan, Surabaya, Sabtu (2/2/2019), disebut oleh La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai bentuk dukungan dirinya secara total kepada calon presiden (capres) nomor urut 01 tersebut.

“Kehadiran ribuan La Nyalla Academia, bentuk totalitas saya mendukung Jokowi hingga 2 periode,” kata La Nyalla

SEARCH

DISEMPURNAKAN OLEH Google

– ADVERTISEMENT –



– ADVERTISEMENT –

Visi Harus Punya Kaki

[HOME](#)[NEWS](#)[POLITIK](#)[HUKUM](#)[NASIONAL](#)[EKONOMI](#)[OPINI](#)[SUARA RAKYAT](#)[BERITA FOTO](#)

🔍 / Politik / Terkait Tiga Periode, JokPro Gelar Syukuran di Seknas Jokowi – Prabowo 2024

Terkait Tiga Periode, JokPro Gelar Syukuran di Seknas Jokowi – Prabowo 2024

🕒 20 Juni 2021 11:00



RadarkotaNews, Jakarta - Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo (JokPro) 2024 adalah apresiasi untuk teman-teman dalam sebuah komunitas yang dipelopori oleh putra-putra untuk menjadi wadah dan menghimpun supaya Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan damai

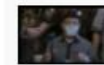
Terkini



Rencana Vaksin Individual Berbayar Bikin Ambyar



Check Poin PPKM Darurat Jaktim Lancar



KSPI Minta di Tengah PPKM Darurat Hak-Hak Buruh Dilindungi



Gelar Bincang Santai: ISMEI dalam Kebijakan Dana PEN, PPKM dan Isolasi Mandiri



Menyaksikan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Di Negara Hukum



Pemerintah Harus Serius Mengatasi Masalah Covid-19 Dengan Menutup Pintu Kedatangan WNA



Arsul Usul Dokter Lois diberi Kerja Sosial Sebagai Penyadar Bahwa Pandemi Adalah Hal Berbahaya



3,6 Ton Barang Bukti Narkotika di Musnahkan



Presiden Lantik 700 Perwira Remaja TNI dan Polri



Politik Kursi Panas



JOKPRO 2024 OPTIMIS AMANDEMEN AKAN TERJADI

Berdasarkan 4 alasan di atas...

Jokpro 2024 sangat optimis Amandemen Ke-5 UUD NRI 1945 akan terjadi pertengahan tahun 2022. Bahkan bisa jadi lebih cepat di awal tahun karena proses persiapan di internal KPU sudah mulai berjalan di awal tahun 2022.



Komunitas
Jokowi-Prabowo 2024

Cara Bergabung Dengan Komunitas Jokpro 2024

*Silahkan menghubungi Billy Vialli (Divisi Jaringan) di
Nomor WA 0811-8129-797*

Sekretariat Nasional DPP Jokpro 2024

Jalan Tegal Parang Selatan I No. 37, RT.2/RW.5, Tegal
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12790.



Semoga Jokowi-Prabowo 2024 Terwujud.
Insya Allah. Yesss!



TERIMA KASIH